

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENCEGAHAN
SESEORANG KELUAR NEGERI**

**(Studi Kasus Surat Keputusan Jaksa Agung
No. Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Dalam Tindak Pidana
Dan
No. R-002/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Keluar Negeri)**

SKRIPSI

Oleh :

**NURPAJRI HASAN
NPM : 201410115153**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**Judul Proposal : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG
TENTANG PENCEGAHAN
SESEORANG KELUAR NEGERI (Studi
Kasus Surat Keputusan Jaksa Agung No.
Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan
Dalam Tindak Pidana Dan No. R
002/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Keluar
Negeri)**

Nama Mahasiswa : Nurpajri Hasan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115153

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum

Bekasi, 15 Juli 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I



J. Karsa Simamora , S.H., M.M
NIP. 10909021

Pembimbing II



Nina Zainab, S.H., M.H
NIP. 11606055

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG
PENCEGAHAN SESEORANG KELUAR
NEGERI (Studi Kasus Surat Keputusan Jaksa
Agung Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013
Pencegahan Dalam Perkara Pidana Dan Nomor R-
002/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan seseorang
Keluar Negeri).

Nama Mahasiswa : Nurpajri Hasan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115153
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2019

Bekasi, 22 Juli 2019
MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H
NIP. 0323035802

Penguji I : Indra Lorenly, S.H., M.H
NIP. 11606051

Penguji II : Nina Zainab, S.H., M.H
NIP. 11606055

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H
NIP. 17012307

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H
NIP. 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “*Keputusan Jaksa Agung Tentang Pencegahan Seseorang Keluar Negeri (Studi Kasus Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Dalam Tindak Pidana dan Nomor R-002/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Keluar Negeri)*”.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 15 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Nurpajri Hasan

201410115153

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurpajri Hasan
NPM : 201410115153
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas royalti non-eksklusif (*non-exclusive-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Keputusan Jaksa Agung Tentang Pencegahan Seseorang Keluar Negeri (Studi Kasus Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Dalam Tindak Pidana dan Nomor R-002/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Keluar Negeri)”.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti non-eksklusif Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan / mempublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang muncul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini, menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 Juli 2019

Yang menyatakan,



Nurpajri Hasan
201410115153

ABSTRAK

Nurpajri Hasan, 201410115153 Skripsi “*Keputusan Jaksa Agung Tentang Pencegahan Seseorang Keluar Negeri (Studi Kasus Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Dalam Tindak Pidana dan Nomor R-002/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Keluar Negeri)*”.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang memunculkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui apakah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung dapat dibatalkan dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Jaksa Agung ialah termasuk Pejabat Tata Usaha Negara, dan yang kedua untuk mengetahui apakah ada sanksi administratif yang diterima oleh Jaksa Agung terkait kewenangannya dalam menerbitkan suatu Keputusan, yang mana dalam keputusan tersebut melanggar Undang-undang Aparatur Sipil Negara, dalam penerapan kewenangan Jaksa Agung yang menjadi dasar dalam mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Dalam Tindak Pidana dan Nomor R-002/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Keluar Negeri.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa, pertimbangan Jaksa Agung dalam membuat surat keputusan tentang pencegahan seseorang keluar negeri belum mencerminkan rasa keadilan. Jaksa Agung tidak melihat secara keadaan medis dan psikis dari Sdr. Hendra Widjadja, S.E akibat kegiatan surat keputusan tersebut. Dan akibat yang muncul karena adanya surat keputusan tersebut sangat berdampak pada kesehatan bahkan keluarga beliau.

Kesimpulan dalam penelitian ini, agar dapat setiap kewenangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan kepada peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan hirarki perundang-undangan, agar terciptanya keselarasan antara pejabat negara dengan masyarakat. Sehingga dalam bernegara memiliki rasa saling menghormati satu dengan yang lainnya.

Saran dalam penelitian ini adalah, Jika pemerintah ingin mengeluarkan suatu surat atau keputusan, pemerintah harus lebih memikirkan hak-hak warga negara yang dilindungi oleh undang-undang dan dari peraturan lainnya serta aspek keadilan lainnya.

Kata Kunci : Keputusan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung, Pencegahan keluar Negeri.

ABSTRACT

Nurpajri Hasan, 201410115153 Thesis "Attorney General's Decision on Prevention of Someone's Exit (Case Study of Attorney General's Decree Number Kep-001 / D / Dsp.3 / 01/2013 Prevention in Criminal Actions and Number R-002 / D / Dsp.3 / 01/2013 Prevention of Exit) ”.

State Administrative Decision is a written stipulation issued by a state administration body or official that contains state administrative legal actions based on applicable laws, concrete, individual and final laws that give rise to legal consequences for a person or civil legal entity .

In this regard, this study has the first two objectives, to find out whether the Decree issued by the Attorney General can be canceled in the realm of the State Administrative Court, because the Attorney General is including the State Administration Officer, and the second is to find out whether there are administrative sanctions received by the Attorney General regarding his authority in issuing a Decree, which in that decision violates the State Civil Apparatus Act, in the application of the Attorney General's authority which is the basis for issuing the Attorney General's Decree Number Kep-001 / D / Dsp.3 / 01/2013 Prevention of Criminal Acts and No. R-002 / D / Dsp.3 / 01/2013 Prevention of Exit.

Based on the results of the study stated that, the Attorney General's consideration in making a decree regarding the prevention of someone going abroad has not reflected a sense of justice. The Attorney General does not see the medical and psychological conditions of Mr. Hendra Widjadja, S.E due to the activities of the decree. And the consequences that arise because of the decree greatly affects the health of even his family.

The conclusions in this study are that every authority issued by State Administration Officers must be based on higher regulations in accordance with the hierarchy of legislation, so that harmony between state officials and the community can be created. So that the state has mutual respect for one another.

Suggestions in this study are, If the government wants to issue a letter or decision, the government must think more about the rights of citizens protected by law and from other regulations and other aspects of justice.

Keywords: State Administration, Attorney General, Prevention of Foreign Affairs.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasihNya yang selalu melimpah terhadap penulis ditengah perjuangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti.

Penulisan skripsi ini, penulis memilih judul: *“Keputusan Jaksa Agung Tentang Pencegahan Seseorang Keluar Negeri (Studi Kasus Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Dalam Tindak Pidana dan Nomor R-002/D/Dsp.3/01/2013 Pencegahan Keluar Negeri)”*.

Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan S.H., M.H., M.B.A selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sedekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran transformatif.
4. Junla Karsa Simamora S.H., M.M selaku Pembimbing I yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Nina Zainab S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademik yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.

7. Kedua orang tua dan mertua penulis, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh dan mendidik, serta memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai sesuai harapan penulis.
8. Amelia Sutihat, A.Md.Keb dan Muhammad Danis Hasan sebagai isteri dan anak penulis, terimakasih atas dukungan dan semangatnya dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai sesuai harapan penulis.
9. Alm. Ustj. Nurbaeti, S.Pd.I dan Kakak-kakakku terimakasih telah menjadi motivasi serta penyemangat tersendiri bagi penulis, sehingga penulis tidak pernah letih dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Romi Santoso, S.T., M.M sebagai Manager PT. Tesco Indomaritim, terimakasih atas bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai harapan penulis.
11. Letda. Eko Bagus Saputra, S.H yang telah mendukung dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini sesuai harapan penulis.
12. Bapak Mujoko sebagai Supervisor Alpha PT. Indika Logistics Support and Services, terimakasih atas dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai harapan penulis.
13. Untuk teman-teman sekolah, teman-teman kerja dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 15 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual,Kerangka Pemikiran.....	8
1.4.1 Kerangka Teori.....	8
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	15
1.5 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data	16
1.5.1 Metode Penelitian	16
1.5.2 Metode Pengumpulan Data	17
1.6 Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Pengertian Peradilan serta Sejarah TUN.....	20
2.1.1 Pengertian Peradilan TUN	20
2.1.2 Sejarah Peradilan TUN	21
2.1.3 Tujuan Peradilan TUN	22
2.2 Pengertian Kewenangan dalam Peradilan Tata Usaha Negara	23
2.2.1 Kriteria Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.....	23
2.2.2 Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara	23
2.2.3 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.....	27
2.2.4 Keputusan TUN Bukan Objek TUN.....	28
2.3 Pengertian serta Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara	29
2.3.1 Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara	29
2.3.2 Pengertian Kewenangan Pejabat TUN	30
2.4 Macam-Macam Keputusan dan Perluasan Tata Usaha Negara.....	31
2.4.1 Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara	31
2.4.2 Macam-Macam Keputusan Tata Usaha Negara	33
2.4.3 Asas-asas Umum Tentang Pemerintahan Yang baik	35
2.5 Pengertian Pencegahan Keluar Negeri	40
2.5.1 Pencegahan Keluar Negeri	40
2.5.2 Tujuan Pencegahan Keluar Negeri	41
2.5.3. Syarat Pencegahan	42
BAB III HASIL PENELITIAN	43
3.1 Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 41/G/2015/Ptun-Jkt.	
3.1.1 Kasus Posisi.....	43
3.1.2 Identitas Para Pihak.....	44
3.1.3 Fundamentum Petendi/Posita.....	45
3.1.4 Petitum atau Permohonan Tuntutan.....	46
3.1.5 Pembuktian.....	51

3.1.6	Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama.....	56
3.1.7	Amar Putusan.....	59
3.2	Putusan Hakim Mahkamah Agung dengan Nomor :38 K/TUN/2018	55
3.2.1	Pertimbangan Hakim	55
3.2.2	Amar Putusan.....	56
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....		57
4.1	Keputusan Tata Usaha Negara Jaksa Agung Republik Indonesia Ditinjau dari Segi AAUPB	57
4.1.1.	Keputusan TUN Jaksa Agung ditinjau dari AAUPB	57
4.2	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor Putusan 38 K/TUN/2018 Tentang Pencegahan Seseorang Keluar Negeri	65
4.2.1.	Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara	67
4.2.2.	Pertimbangan Tentang Gugatan Prematur	69
4.3.	Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi	69
4.3.1.	Analisa Penulis	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		73
5.1	Kesimpulan	73
5.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		
LEMBAR BIMBINGAN 1		
LEMBAR BIMBINGAN 2		

MOTTO



DAFTAR SINGKATAN

1. PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara)
2. MA (Mahkamah Agung)
3. KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara)
4. AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik)



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri
2. Putusan Mahkamah Agung
3. Riwayat Hidup Penulis
4. Lembar Bimbingan 1
5. Lembar Bimbingan 2

